BAB III

ANALISIS *LINKEE* FILIPINA MENERIMA TAWARAN *BELT AND ROAD INITIATIVE*

Bab III ini akan membahas bagaimana posisi Filipina Setelah menganalisis dari sudut pandang Tiongkok sebagai *Linker* pada Bab II. Maka bab ini akan membahas mengenai analisis dari sudut pandang Filipina sebagai *Linkee*. Adapun pembagian subbabnya pada Bab III ini akan dijabarkan menjadi empat subbab bagian yakni Filipina sebagai *Linkee*, Tujuan Filipina, penerimaan Filipina atas tawaran BRI serta Aspek Keuntungan dan Kerugani Filipina.

3.1 FILIPINA SEBAGAI *LINKEE*

Sebagaimana dijelaskan oleh Haas, mengenai konsep *Issue Linkage* adalah *linkee* yang menjalankan peranan yang cukup penting dalam hubungan dengan kerja sama. Berjalan atau tidaknya hubungan kerja sama dalam konteks *Issue linkage* pihak *Linkee* sangat berpengaruh untuk suksesnya tawaran dari *Linker* terkait menerima tawaran atau tidak (Haas, 2011, p. 372). Oleh karena itu, Filipina sangat sesuai untuk diposisikan sebagai *Linkee* pada tulisan ini.

Filipina diposisikan sebagai *Linkee* karena data mengatakan bahwa Filipina sangat terfokus kepada gugatan klaim terhadap wilayah teritorialnya yang menjadi pergerakan dari Tiongkok. Terlebih lagi, usaha itu gagal karena perbedaan kekuatan dan adanya tolakan dari pihak Tiongkok untuk mengikuti proses penyelesaian sengketa laut Tiongkok Selatan. Hal yang terjadi adalah Tiongkok yang menawarkan isu baru untuk menjalin hubungan pembangunan perekonomian yang lebih baik.

Tujuannya adalah mengesampingkan ketegangan yang terjadi antara kedua negara ini dalam konflik Laut Tiongkok Selatan.

Keterlibatan Filipina ini tentu saja melalui perubahan haluan kepemimpinan presiden yang berkuasa. Tiongkok semakin yakin untuk melibatkan Filipina dalam proyek BRI di Maritim. Terlebih lagi, pergantian presiden Duterte membawa kedekatan dengan hubungan yang baik dengan Tiongkok untuk melancarkan BRI di Filipina. Duterte merasa yakin Filipina akan mendapatkan keuntungan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan Tiongkok karena penempatan Filipina menjadi *Linkee* adalah sebuah keputusan yang tepat bagi kemajuan perekonomian Filipina.

3.2 TUJUAN YANG INGIN DICAPAI FILIPINA

Hasil dari arbitrase internasional yang diajukan oleh pemerintahan Aquino sangat mungkin untuk mendukung Filipina. Hal ini memberi Duterte pengaruh dalam tawar-menawar dengan Tiongkok. Manila dan Beijing mungkin mencapai rekonsiliasi yang mana Filipina akan diminta untuk menggunakan pendekatan rendah terhadap hasil arbitrase dan beralih ke negosiasi bilateral dengan Tiongkok sebagai gantinya, Tiongkok akan memasukkan Filipina ke dalam BRI, memperluas investasi di Filipina dan mencari kerja sama yang lebih besar dalam pembangunan infrastruktur (Times, 2016).

3.2.1 Tujuan Keamanan (klaim Kawasan Laut Tiongkok Selatan)

Tiongkok meloloskan Rencana Besar 2010-2020 untuk Konstruksi dan Pengembangan untuk Pulau Pariwisata Internasional Hainan. Di mana Kepulauan

Spratly dan Paracel akan dimasukkan ke dalam kompleks laut multi tujuan. Terlebih lagi, rute wisata udara dan laut yang menuju Paracel akan dipromosikan, dan pendaftaran hak untuk menggunakan pulau tak berpenghuni akan didorong (China Ministry, 2010)**.**

Posisi Filipina dalam masalah Laut Tiongkok Selatan adalah Filipina mencari penghargaan deklaratori atas tiga hal yang saling terkait. Pertama, bahwa klaim Tiongkok mengenai hak dan kewajiban terkait perairan, dasar laut, dan fitur maritim Laut Tiongkok Selatan (berdasarkan hak historis dan seperti yang digambarkan dalam peta yang mengandung garis sembilan garis putus-putus) tidak valid karena tidak konsisten dengan Konvensi (DOC). Kedua, Filipina mencari kepastian apakah fitur-fitur maritim tertentu yang diklaim oleh Tiongkok dan Filipina di bawah Konvensi diklasifikasikan dengan tepat sebagai pulau, bebatuan, dataran rendah dari Jenis hak maritim yang mampu mereka hasilkan (Pemmaraju, 2016, p. 7).

Filipina memfokuskan pada hubungan ini, khususnya di Scarborough Shoal dan delapan fitur khusus dalam kelompok Pulau Spratly. Tujuan utama Filipina dalam mengangkat dua masalah ini adalah untuk mempertanyakan klaim Tiongkok atas kedaulatan atas fitur-fitur maritim ini. Selanjutnya menggunakannya sebagai dasar untuk hak maritimnya. Ketiga, Filipina mendeklarasikan bahwa Tiongkok melanggar Konvensi dengan mengganggu pelaksanaan hak dan kebebasan kedaulatan Filipina di bawah Konvensi dan melalui kegiatan konstruksi dan penangkapan ikan yang telah merusak lingkungan laut (Pemmaraju, 2016, p. 7).

Terkait keinginan Filipina di atas menggerakkan Majelis Arbitrase yang dibentuk di bawah Annex VII *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) untuk memeriksa berbagai klaim yang diajukan oleh Filipina tidak kurang dari 15

pengajuan gugatan. Submisi yang diperiksa memiliki beberapa tujuan dan gugatan yang berisikan sebagai berikut. Hal yang berhubungan dengan klaim yang lebih luas dari Tiongkok yang memiliki hak maritim di Laut Tiongkok Selatan yang menurut pandangan Filipina melampaui yang disediakan oleh UNCLOS (Gau, 2015, p. 55).

Kemudian, lebih lanjut, Filipina meminta pernyataan dari Tribunal bahwa klaim Tiongkok berdasarkan garis sembilan tidak konsisten dengan UNCLOS dan tidak valid. Selain itu adanya gugatan terkait status kawanan Scarborough, Mischief Reef, Second Thomas Shoal, dan Subi Reef. Adapun kegiatan Tiongkok di Thomas Shoal, Filipina mengklaim sebagai pencegahan dari melaksanakan haknya menempatkan pasukannya di kawanan dan navigasi di sekitarnya. Serta serangkaian perselisihan mengenai kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang sah disengketakan oleh Filipina (Gau, 2015, p. 55).

Beberapa usaha klaim di atas yang disebutkan adalah menjadi tujuan kepentingan Filipina atas klaim Laut Tiongkok Selatan di wilayah Filipina oleh Tiongkok. Tujuan keamanan klaim wilayah untuk kembalinya menjadi kepemilikan utuh adalah tujuan terbesar Filipina dalam sengketa dengan Tiongkok. Selain itu, Filipina juga menginginkan wilayahnya netral dari kegiatan militer dari Amerika Serikat maupun Tiongkok itu sendiri. Secara terbuka Filipina telah menolak patroli gabungan yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan angkatan laut Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan yang diperselisihkan bersama dengan latihan tempur bersama (Gregory B. Poling, 2018).

3.2.2 Tujuan Ekonomi (Realisasi *Belt and Road Initiative*)

Meninjau keadaan Filipina yang membutuhkan kemajuan dengan pembangunan perekonomian untuk menindaklanjuti rancangan pembangunan infrastruktur kedepan. Salah satu tujuan yang diinginkan Filipina yakni terealisasikan dengan adanya proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) di *Maritime Silk Road* (MSR). Tiongkok mendeklarasikan keterlibatan Filipina menjadi bagian dari proyek yang telah direncanakan oleh Tiongkok. Rencana infrastruktur pelabuhan di negara ini seefisien mungkin akan menekan untuk bebas korupsi, walaupun menjadi suatu hal yang susah, akan tetapi hal ini menjadi hal penting untuk dilaksanakan (Rabena, 2018, p. 688).

Keterlibatan Filipina di proyek ini akan mempengaruhi pada tantangan logistik, politik, dan keuangan. Kebijakan ekonomi makro yang baik dan percepatan pembangunan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Filipina yang baru-baru ini disetujui 2017-2022 terbukti menjadi waktu dan kepentingan yang strategis (Rabena, 2018, p. 688). Filipina memulai dengan lingkungan yang mendukung untuk keberhasilan proyek infrastruktur dan pembangunan perekonomian negara. Keberhasilan pelaksanaan BRI tidak hanya bergantung pada seberapa baik hubungan antara Tiongkok dan Filipina, tetapi juga pada perencanaan infrastruktur yang efisien dan bersih oleh pemerintah Filipina (Darlene, 2017).

3.3 PENERIMAAN FILIPINA TERHADAP TAWARAN BRI

Haas menerangkan kembali terkait kredibilitas dari *Tactical Linkage* yang tergantung pada persepsi dari kemampuan dan kemauan dari para *Linkee* untuk menerima tawaran kolaborasi kerja sama. pada posisi ini, penggunaan kekuasaan

selalu dibatasi oleh persepsi interdependensi kompleks yang mendorong para pihak untuk bernegosiasi untuk mencapai tujuannya secara kolektif (Haas, 2011, p. 372). Sehingga pihak *Linkee* mempunyai kendali sendiri akan menerima tawaran atau bahkan menolaknya. Hal ini tergantung pada seberapa besar pihak *Linkee* merasa keuntungannya daripada kerugiannya.

3.3.1 Perubahan Kepentingan Filipina di Laut Tiongkok Selatan

Ketegangan maritim yang belum terselesaikan antara negara Tiongkok dan Filipina dapat mempengaruhi masa depan komitmen investasi dan pendanaan. Pada peringkat popularitas Presiden Duterte, ada kekhawatiran yang berkembang tentang ketidaksesuaian antara kecepatan Tiongkok membangun struktur di pulau Sansha yang disengketakan. Ketidaksesuaian tersebut tidak sebanding dengan sedikitnya kemajuan sebenarnya telah dibuat pada proyek infrastruktur atau aliran *Philippines Foreign Direct Investment* (FDI) yang telah diterima Filipina dari Tiongkok sejauh ini. Tiongkok telah membangun struktur yang mampu menampung pesawat tempur dan kapal perang di daerah yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan bahkan setelah Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 yang mencampakkan klaim Beijing atas sebagian besar perairan tanpa dasar hukum (Lopez, 2018).

Sementara Tiongkok dengan pengembangan secara terus-menerus militer dari berbagai terumbu dan atol telah berubah menjadi pulau buatan selama beberapa tahun terakhir yakni menjadi pulau Sansha. Hal ini telah semakin jauh dari memperkuat cengkeramannya di Scarborough Shoal. Militerisasi kepulauan buatan yang baru didirikan dapat diartikan sebagai bukti ketegasan Tiongkok dan tindakan agresif yang

terus berlanjut. Pemerintah Duterte terkait inti masalahnya bukan pengembangan lanjutan dari pulau Sansha, tetapi apakah Tiongkok berhenti untuk membangun pulau lainnya (Maritime, 2017).

Perkembangan sehubungan dengan eksplorasi bersama. Kedua pemerintah telah berdiskusi terus menerus mengenai hal ini. Tiga perkembangan perlu dicatat yang dapat membantu membentuk wacana baru tentang eksplorasi dan pengembangan bersama tanpa dibatasi waktu secara langsung menghadapi masalah terkait hukum dengan eksplorasi di wilayah Laut Tiongkok yang disengketakan. Menindaklanjuti ketegangan yang disengketakan, Tiongkok telah memberi tawaran oleh *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) kontrak untuk pendirian fasilitas gas alam lapis baja pertama di Filipina (Diplomacy, 2018).

Departemen Luar Negeri Filipina memberi akses bagi penelitian ilmiah kelautan bersama antara Institut Kelautan Tiongkok dari Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok dan Institut Ilmu Kelautan Universitas Filipina di perairan timur Filipina (Pazzibugan, 2018). Tiongkok telah mencoba untuk menenangkan perairan dengan secara eksplisit. Hal ini dengan membingkai penelitian yang dilakukan dalam air di bawah yurisdiksi Filipina dan juga bertujuan menciptakan suasana yang baik untuk pengembangan hubungan bilateral (Xinhua, 2018).

Secara bersamaan, Menteri Luar Negeri Filipina Cayetano mengungkapkan bahwa kedua negara akan membahas bagaimana menerapkan eksplorasi bersama di wilayah yang disengketakan tanpa menyinggung klaim teritorial Laut Tiongkok Selatan. Tujuan dari diskusi itu adalah kesepakatan bahwa eksplorasi bisa dijalankan dengan sesuai hukum Filipina dan hukum Tiongkok. Oleh karena itu, Pemerintah Duterte secara tidak langsung sangat condong sekali ke arah Tiongkok dari berbagai

hal. Bahkan selain penerapan *Belt and Road Initiative*, rezim Duterte telah menyetujui pembangunan eksplorasi dengan kerja sama eksplorasi bersama (Pazzibugan, 2018).

3.3.2 Revitalisasi Hubungan Ekonomi

Filipina dapat memperoleh keuntungan secara ekonomi dari perbaikan hubungan bilateral. Ekspor Filipina yang telah mengalami penurunan selama tahun terakhir Kepresidenan Aquino naik lagi di bawah Duterte. Ekspor keseluruhan ke Tiongkok mencapai US $ 5.713 juta selama tahun terakhir Aquino dibandingkan dengan US $ 6.913 juta selama tahun pertama Duterte (Kreuzer, 2018, p. 19).

Pariwisata Tiongkok juga mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 39% untuk periode yang sama tahun 2017. karena kunjungan Duterte ke Tiongkok pada bulan Oktober 2017, Tiongkok mencabut peringatan perjalanannya ke Filipina yang telah dikeluarkan pada tahun 2014. Selain itu, Filipina mengubah kebijakan visa mereka untuk orang Tiongkok (Jianhua, 2018).

Filipina telah menerima lebih dari 972.000 turis Tiongkok dan mencapai 34,9 persen peningkatan tahun ke tahun. Filipina memiliki alasan untuk mengharapkan lebih dari 1,5 juta turis Tiongkok mengunjungi Filipina tahun ini dan menghasilkan pendapatan lebih dari 32 miliar Peso secara total. Kota dan pelabuhan utama Filipina seperti Manila dan Cebu telah membuka penerbangan langsung ke Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Nanning, serta rute berlayar ke pelabuhan Teluk Beibu, pelabuhan Xiamen dan pelabuhan Shanghai (Jianhua, 2018).

Investasi infrastruktur Tiongkok ke Filipina perlahan mendapatkan daya tarik. Berbagai proyek yang digagas selama kunjungan Presiden Filipina Duterte ke

Tiongkok dikembangkan lebih lanjut. Realisasi tersebut meliputi Proyek Bendungan Kaliwa dan Proyek Irigasi Pompa Sungai Chico untuk Proyek Kereta Api Utara Selatan, sepanjang jalan menuju proyek Jembatan Binondo Intramuros dan Estrella Pantaleon yang menghubungkan bagian utara dan selatan Metro Manila. *China Development Bank* dan *Bases Conversion* dan *Development Authority Filipina* juga menandatangani untuk membangun kerangka kerja bagi kerja sama keuangan beberapa proyek hingga US $ 4,5 miliar (Kreuzer, 2018, p. 21).

Pembiayaan Tiongkok juga datang untuk Proyek Long Haul South Railways Filipina Selatan yang akan membangun kereta api sepanjang 581 km dari Manila ke Kota Batangas, Kota Legaspi dan Matanog. Lebih lanjut, perusahaan milik negara Tiongkok menawar di sejumlah proyek pekerjaan umum di Filipina, seperti, misalnya, gedung terminal bandara Internasional Clark yang baru. Bagi Filipina, kegiatan-kegiatan ini dengan jelas memberi isyarat bahwa Tiongkok akhirnya memasukkan Filipina dalam BRI (Warwick, 2018).

Filipina memperoleh momentum positif dalam memperbarui hubungan politik dan keamanan dengan Tiongkok. Terlepas dari putusan arbitrase yang menguntungkan, karena kemampuan angkatan lautnya yang lemah, Filipina tidak dapat memaksakan hak maritimnya dan menantang barikade Penjaga Pantai Tiongkok di Beting Scarborough. Dialog bilateral tingkat tinggi yang lebih luas mengenai sengketa maritim telah dilanjutkan setelah partisipasi Duterte dalam Pertemuan Tingkat Tinggi BRI di Beijing Mei lalu (Rabena, 2018, p. 686).

Pemanasan hubungan bilateral setelah bertahun-tahun hubungan dingin dapat dikaitkan dengan kebijakan pragmatis Duterte. Terbukti, ia berangkat dari pembangkangan pemerintahan Aquino melawan ketegasan Tiongkok di Laut Filipina

Barat. Dan sebaliknya, Duterte memilih untuk bekerja sama dengan Tiongkok dalam mengelola ketegangan di daerah tersebut dengan tidak mengambil tindakan militer setelah putusan pengadilan, sambil mengumpulkan berbagai konsesi ekonomi dalam prosesnya (Wong A. C., 2017).

Duterte menilai bahwa lebih fokus pada perdagangan dan aspek ekonomi hubungan Filipina dengan Tiongkok. Pada akhirnya akan menguntungkan rakyat Filipina lebih dari sekedar memaksakan klaim maritim nasional yang tidak bisa diterapkan. Kebijakan Ini mungkin tampak sebagai taktik ekonomi yang sangat oportunistik, dan mungkin hampir tampak bahwa Filipina meninggalkan keamanan maritimnya. Tetapi penyesuaian kebijakan luar negeri Duterte memiliki dasar logis yang mencerminkan pendekatan perhitungan dan bisnisnya (Wong A. C., 2017).

Filipina memiliki keuntungan terbesar dari BRI melalui investasi infrastruktur, bahkan ketika ketegangan geopolitik dan penundaan konstruksi tidak membebani pembangunan perekonomian ini. Tiongkok telah menjanjikan sekitar $ 7,34 miliar dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah untuk Filipina selama dua tahun. Administrasi Duterte mengandalkan pendanaan yang mudah untuk mendukung program infrastruktur yang membutuhkan sekitar $ 15 miliar hingga tahun 2022. Janji investasi Beijing menyumbang 10,5% dari produk domestik bruto. Filipina menandatangani enam perjanjian di Forum Boao di China, yang mencakup $ 62 juta kredit untuk Proyek Irigasi Pompa Sungai Chico dan hibah ekonomi dan kerja sama membiayai infrastruktur dan proyek lainnya (Lopez, 2018).

Kebijakan Filipina di bawah Duterte telah menjadi undangan terbuka untuk kembali dan memperluas praktek-praktek kerja sama sebelumnya. konflik dalam kerangka kerja sama yang lebih luas seperti yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan

mampu diredakan. Oleh karena itu, pendekatan Tiongkok ke Filipina lebih mudah dan lancar dibandingkan dengan kepemimpinan Beniqno.

3.4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK FILIPINA

Sama seperti pembahasan keuntungan dan kerugian Tiongkok, Haas menjelaskan mengenai para *stakeholder* yang menggunakan mode tawar-menawar strategis harus memanfaatkan potensi yang tersedia yang mana dilakukan secara efisien dalam mencapai sebuah keuntungan atau kerugian (Haas, 2011, p. 376). Maka dari itu, subbab ini akan menjelaskan terkait keuntungan dan kerugian Filipina sebagai *Linkee*. Sehingga akan menemukan kesesuaian terhadap permasalahan Laut Tiongkok Selatan yang mampu reda oleh berjalannya BRI.

Masuknya Filipina bagian dari BRI membuktikan kecurigaan yang tersebar luas di Manila, ketika Filipina adalah anggota dari BRI. Mengingat bahwa peta-peta sebelumnya yang diterbitkan oleh Tiongkok tidak termasuk rute yang melintasi atau meliput Filipina. Pada pemerintahan Duterte, membuka jalan dari kemitraan komprehensif dengan Tiongkok yang berdalih pendekatan utama terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan menghasilkan respon positif dari Filipina. Terlebih lagi, Filipina tampak jelas dalam mekanisme bilateral yang telah dibentuk “misalnya, Mekanisme Konsultasi Bilateral dan Komite Penjaga Pesisir Bersama” (Placido, 2017).

Kunjungan tingkat tinggi juga telah dilanjutkan oleh Duterte melakukan dua perjalanan ke Tiongkok dalam 7 bulan pertama. Selain itu, pihak Tiongkok melakukan tiga kunjungan tingkat tinggi (Wakil Perdana Menteri Wang Yang, Menteri Luar

Negeri Wang Yi, dan Perdana Menteri Li Keqiang) ke Filipina dalam periode waktu yang sama. Selain itu, persepsi masyarakat Filipina tentang Tiongkok juga berubah, dengan semakin banyak orang Filipina mulai percaya bahwa Tiongkok sudah menjadi ekonomi terdepan di dunia dan menjadi kiblat perekonomian bagi Filipina (Bishop & Poushter, 2017).

BRI datang pada saat yang tepat, karena Filipina mempunyai permasalahan infrastruktur yang telah menjadi kemunduran besar dalam mempromosikan pembangunan industri dan nasional negara. Indeks Daya Saing Global dari Forum Ekonomi Dunia infrastruktur Filipina ASEAN "jalan, rel kereta api, pelabuhan, transportasi udara, listrik, dan telekomunikasi" menempati peringkat ketujuh dari sembilan negara (Rabena, 2018, p. 689).

Tidak hanya itu saja, di Manila misalnya, sebanyak US $ 70 miliar terbuang setiap tahun karena ketidakefisienan yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang tepat. Dari sudut pandang keamanan, pendirian Pertahanan Filipina percaya bahwa BRI dapat membantu dalam mengatasi masalah pemberontakan dan ketidakstabilan politik di Mindanao karena pembangunan infrastruktur menghasilkan proliferasi peluang ekonomi (GMA News, 2017).

Mengingat kinerja ekonomi Filipina yang terus meningkat, tumbuh 6,7% tahun 2016. Filippina dapat mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mencapai inklusivitas melalui investasi infrastruktur yang lebih banyak. Sejak kunjungan Duterte ke Tiongkok pada tahun 2016, lebih dari 20 perjanjian bilateral telah ditandatangani, yang mencerminkan bagaimana Tiongkok memajukan kerja sama dalam lima dimensi utama kerja sama BRI (Rabena, 2018, p. 689).

Golden Age of Infrastructure adalah pengembangan dan Upaya pertumbuhan ekonomi pemerintahan Duterte dari pengeluaran besar-besaran dengan mengalokasikan $ 170 miliar atau 7,4% dari GDP atau *Produk Domestik Bruto* (PDB) untuk pembangunan infrastruktur dan modernisasi pada 2022 (Diokno, 2017). Program yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Filipina (2017–2022), merupakan bagian dari Ambisyon Natin 2040 "visi jangka panjang" dengan tujuan inklusivitas dan desentralisasi pusat pertumbuhan di Filipina. Pemerintah Filipina mengharapkan bahwa investasi infrastruktur akan mendorong pertumbuhan PDB menjadi 7%-8% dari 2018 hingga 2022 (dari 6,2% dalam 6 tahun terakhir) dan menurunkan tingkat pengangguran menjadi 3%-5% (dari 5,5% pada tahun 2016) dan tingkat kemiskinan menjadi 14,6% (dari 21,6% pada tahun 2015) (Rabena, 2017).

BRI mendukung Filipina untuk perdagangan bebas. Filipina akan mengembangkan pasar baru dan memperdalam hubungan regional. serta lebih banyak transaksi pelabuhan dan bandara meningkatkan biaya transportasi secara signifikan. Industri manufaktur Filipina, khususnya produsen elektronik dan sektor ekspor makanan akan menjadi penghasil terbesar. Tiongkok telah menjanjikan US $ 7,34 miliar pinjaman lunak atau bantuan pengembangan resmi dan hibah untuk proyek infrastruktur Filipina pada kedua kerja sama "pembangunan infrastruktur dan konektivitas", berskala besar serta masuk dalam program-program unggulan (Padilla, 2018). Jumlah ini merupakan bagian dari perjanjian senilai 24 miliar dolar Beijing yang dikomitmenkan kepada Duterte dalam kunjungan pertamanya ke Tiongkok pada 2016 (Cheng, 2016).

Menariknya, dari 2016 hingga 2017, Pinjaman dan hibah dari Tiongkok mencatat kenaikan sebesar 5.862% (Calonzo, 2018). Menurut Departemen Perdagangan dan

Industri, $ 24 miliar dalam perjanjian komersial, Filipina dengan Tiongkok diperkirakan menciptakan dua juta pekerjaan di Filipina (Ranada, 2016). Sebanyak US $ 7,34 miliar, yang dibagi menjadi dua komponen sebagai penindaklanjutan rencana termasuk 10 proyek tiket besar yakni dua jembatan di Metro Manila, dua pusat rehabilitasi narkoba di Mindanao (Placido, 2017).

Terkait keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pihak *Linkee*, Haas menjelaskan bagaimana *Tactical Issue Linkage* adalah taktik negosiasi yang menghindari ketergantungan pada hubungan intelektual di antara isu-isu yang terkait. Pihak yang lebih lemah *(Lnkee)* akan mengesampingkan kepentingan yang tidak tercapai dengan menerima kesepakatan bahkan jika beberapa masalah gagal diselesaikan. Negosiasi yang diterima oleh *Linkee* di antara isu-isu belum tentu optimal (Haas, 2011, p. 373). Dengan kata lain, pihak *Linkee* mempunyai dua dampak dari keuntungan dan kerugian. Namun, resiko dari kerugian Filipina dikesampingkan demi keuntungan pembangunan perekonomian yang prospek kemajuannya akan lebih besar.

Dari serangkaian tuntutan yang telah diajukan oleh Filipina, Tiongkok menolak untuk arbitrase oleh Filipina dan berpegang pada posisi tidak menerima atau berpartisipasi dalam proses tersebut. Oleh karena itu, pengadilan internasional atau lebih dikenal dengan ICJ “International Court of Justice” tidak menerima yurisdiksi tanpa adanya persetujuan dari pihak tertuntut karena isu-isu mengenai interpretasi dan penerapan Konvensi dapat timbul hanya setelah kedaulatan negara atas fitur maritim ditentukan. Tiongkok menunjukkan fitur maritim tidak memiliki hak maritim atau hak apapun ketika tidak tunduk pada kedaulatan negara yang mana dalam artiannya,

wilayah maritim tidak memiliki hak apapun ketika tidak termasuk dalam wilayah kedaulatan suatu negara (Holmes O. , 2016).

Tiongkok keberatan dengan pemilihan fitur maritim tertentu untuk tujuan menilai kelayakan wilayah tersebut untuk menghasilkan zona maritim. Klaim Tiongkok adalah untuk kedaulatan atas seluruh Kepulauan Nansha (Spratly) merupakan kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, khususnya (Taiping Dao), pulau terbesar dan daerah maritim lainnya. Akan tetapi Taiping Dao (Abu Island) di Kepulauan Nansha (Spratly) saat ini dikendalikan oleh pihak berwenang Taiwan. Penyerahan Filipina dalam hal ini juga mengecualikan beberapa bagian lain dari Kepulauan Nansha (kelompok Kepulauan Spratly) (Myers, 2018).

Tiongkok menganggap bahwa bagian-bagian pulau yang dikecualikan oleh Filipina berada di bawah pendudukan ilegal. Pengecualian ini merupakan penyimpangan dari nilai dan batasan perselisihan Tiongkok dengan Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Mengenai kategori klaim yang diajukan oleh Filipina, Tiongkok berpendapat bahwa legalitas tindakan Tiongkok dalam perairan Nansha (Spratly) dan Huangyan Dao (Scarborough Shoal) bersandar pada kedua kedaulatannya atas fitur maritim yang relevan dan hak maritim yang diturunkan darinya (Calvo, 2015).

Namun demikian, menurut Mark J. Valencia yang mengatakan bahwa administrasi Duterte harus berhati-hati untuk tidak mengurangi klaim atau haknya dalam Laut Tiongkok Selatan. Ia harus terus memprotes secara pribadi atau publik ketika percaya Tiongkok telah melanggar pemahaman atau rincian hasil arbitrase itu sendiri. Oleh karena itu, Filipina harus menghindari dari pernyataan resmi atau mengambil tindakan apa pun yang bersentuhan langsung dengan klaimnya, termasuk mengakui atau bahkan menyiratkan bahwa setiap area yang secara hukum menjadi

miliknya yang disengketakan. Namun, putusan panel arbitrase sekarang menjadi bagian dari hukum internasional dan tidak mungkin berubah dengan mudah atau cepat (Valencia, 2018).